

Sosialisasi Jaminan Kesehatan Kepada Pengawas Lapangan di UPTD Pengolahan Sampah dan TPA Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai

Socialization of Health Insurance to Field Supervisors at UPTD Waste Processing and TPA for the Binjai City Environmental Service,"

Fahmi Syahpreza Tarigan¹, Syahrul'an², Erni Susilawati³, Marniati⁴

^{1,2,3}Prodi Administrasi Kesehatan, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Deztron Indonesia

⁴ Fakultas Sosial Sains dan Ilmu Pendidikan Universitas Ubudiyah Indonesia

Corresponding Author : fahmisyahprezatarigan@udi.ac.id, syahrualan@udi.ac.id, ernisusilawati@udi.ac.id, marniati@uui.ac.id

Abstrak

Latar Belakang : Sosialisasi tentang asuransi jaminan kesehatan di Indonesia kepada pengawas lapangan di UPTD Pengolahan Sampah & TPA Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai berfokus pada upaya memperkenalkan jenis – jenis asuransi kesehatan yang ada di Indonesia seperti asuransi swasta dan pemerintah yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan serta fasilitas dan cara penggunaannya begitu juga dengan premi dan langkah pelayanan yang didapatkan. **Tujuan Kegiatan :** untuk menambah pengetahuan pekerja tentang perbedaan layanan asuransi kesehatan karena saat ini sedang marak kasus seseorang yang menganggap rendah pengguna asuransi kesehatan milik pemerintah yaitu BPJS Kesehatan dibandingkan pengguna asuransi swasta. **Hasil Kegiatan :** Dalam Sosialisasi ini telah tercapai target meningkatkan pengetahuan terhadap perbedaan asuransi swasta dan pemerintah dimana diharapkan para pengawas dapat memberikan pemahaman juga kepada para pekerja di lapangan tentang perbedaan layanan asuransi pemerintah dan swasta.

Kata kunci : Jaminan Kesehatan, Asuransi Kesehatan pemerintah, Asuransi Swasta

Abstract

Background: Socialization about health insurance in Indonesia to field supervisors at the UPTD Waste Processing & TPA Binjai City Environmental Service focuses on efforts to introduce the types of health insurance that exist in Indonesia, such as private and government insurance, namely BPJS Health and BPJS Employment as well as the facilities and how to use them as well as the premiums and service steps obtained. **Activity Objective:** to increase workers' knowledge about the differences in health insurance services because currently there are cases of people who underestimate users of government health insurance, namely BPJS Health, compared to users of private insurance. **Activity Results:** In this socialization, the target of increasing knowledge of the differences between private and government insurance has been achieved, where it is hoped that supervisors can also provide understanding to workers in the field about the differences between government and private insurance services.

Keywords: Health Insurance, Government Health Insurance, Private Insurance

1. PENDAHULUAN

Jaminan Kesehatan Nasional atau Sistem Kesehatan Nasional merupakan pengelolaan kesehatan yang diselenggarakan oleh semua komponen bangsa Indonesia secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Dimana tujuan dari

Sistem Kesehatan Nasional agar terselenggaranya pembangunan kesehatan oleh semua komponen bangsa baik pemerintah, pemerintah daerah dan/atau lembaga swasta secara sinergis, berhasil guna dan berdaya guna sehingga terwujud kesehatan masyarakat yang optimal. Hal ini dapat dilakukan dengan upaya kesehatan

masyarakat berupa peningkatan kesehatan (promotif), mencegah terjadinya penyakit (preventif), melakukan pengobatan (kuratif) dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif). Sehingga diharapkan masyarakat mampu untuk berperilaku hidup bersih dan sehat, mampu mengatasi masalah kesehatan secara mandiri, berperan aktif dalam setiap pembangunan kesehatan, serta dapat menjadi penggerak dalam mewujudkan pembangunan berwawasan Kesehatan (Yuditia et al., 2021).

Negara Indonesia melaksanakan Jaminan Kesehatan Nasional pada tanggal 1 Januari 2014. Jaminan Kesehatan Nasional ini diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas dengan tujuan menjamin agar seluruh rakyat Indonesia memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan diharapkan pemeliharaan kesehatan seluruh rakyat Indonesia dapat terjamin (Sari, SKM, MSE, 2018).

Kepesertaan menurut Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dalam Program Jaminan Kesehatan adalah wajib bagi seluruh penduduk Indonesia dan Orang Asing yang bekerja paling singkat 6 bulan di Indonesia. Peserta Program Jaminan Kesehatan terbagi 2 yaitu Pertama Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) adalah peserta yang iurannya dibayarkan oleh pemerintah pusat terdiri dari orang miskin dan orang tidak mampu. Kedua Peserta Bukan Penerima Bantuan Iuran (Bukan PBI) terdiri dari Pekerja Penerima Upah (PPU) yaitu pekerja yang bekerja pada pemberi kerja dengan menerima gaji atau upah, Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) yaitu pekerja diluar hubungan kerja atau pekerja mandiri serta pekerja lainnya

yang bukan penerima upah, Bukan Pekerja (BP) yaitu investor, pemberi kerja, penerima pensiun, veteran, perintis kemerdekaan, bukan pekerja yang mampu membayar iuran. Diluar ini terdapat penduduk yang didaftarkan oleh pemerintah daerah ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan (Mariyam, 2018).

Pelayanan kesehatan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yaitu Pelayanan administrasi, pelayanan promotif dan preventif, pemeriksaan, pemeriksaan, pengobatan, konsultasi medis, tindakan medis non spesialisik baik operatif maupun non operatif, pelayanan obat, bahan medis habis pakai, transfusi daerah sesuai dengan kebutuhan medis, pemeriksaan penunjang diagnostic laboratorium tingkat pertama dan rawat inap tingkat pertama sesuai dengan indikasi medis (Ridha Munawarah et al., 2023).

Pelayanan kesehatan di Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit yaitu Pelayanan administrasi pelayanan, pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi spesialisik oleh dokter spesialis dan subspecialis, tindakan medis spesialisik, pelayanan obat dan bahan medis habis pakai, pelayanan penunjang diagnostik lanjutan sesuai dengan indikasi medis, rehabilitasi medis, pelayanan darah, pelayanan kedokteran forensik klinik dan pelayanan jenazah pasien yang meninggal di Faskes, perawatan inap non intensif dan inap ruang intensif, pelayanan kesehatan lain yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

Sistem Kesehatan Nasional ini dilaksanakan secara berkelanjutan, sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, sehingga menjadi acuan dalam penyusunan dan pelaksanaan pembangunan kesehatan yang dimulai dari kegiatan monitoring dan evaluasi.

Harapan dari sosialisasi ini

adalah agar meningkatkan pengetahuan dan wawasan masyarakat khususnya pengawas lapangan di UPTD Pengelolaan Sampah dan TPA tentang Program Kesehatan di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang merupakan bagian dari Jaminan Kesehatan Nasional di Indonesia (Mariyam, 2018).

2. Tahap Persiapan

Tahapan persiapan dimulai dengan identifikasi kebutuhan, dalam sosialisasi berdasarkan data pengetahuan pekerja dengan memberi kuesioner sebelum dilaksanakan sosialisasi, menyusun rencana kegiatan serta materi yang relevan, seperti Program Kesehatan di BPJS yang merupakan bagian dari Jaminan Kesehatan Nasional. Persiapan alat peraga, seperti poster dan brosur, juga dilakukan untuk mendukung sosialisasi secara visual. Tim juga melakukan koordinasi dengan pihak Dinas Lingkungan Hidup untuk menentukan tempat dan waktu pelaksanaan. Tim penyelenggara menetapkan tanggal 29 Januari 2025 di Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai, kegiatan tersebut dilakukan pada pukul 08.00 WIB sampai dengan selesai, sebagai waktu yang strategis untuk menyampaikan informasi kepada pekerja.

Dalam tahap persiapan, dilakukan penentuan materi yang akan disampaikan, penyusunan materi dalam bentuk powerpoint, dan perencanaan strategi penyuluhan. Tim juga mempersiapkan alat dan bahan yang diperlukan, serta menyusun pertanyaan yang akan diajukan pada sesi tanya jawab kepada pengawas. Semua langkah ini diarahkan untuk memastikan bahwa kegiatan pengabdian dapat berjalan dengan lancar dan efektif.

3. Tahap Pelaksanaan

Pada tanggal 29 Januari 2025 pukul 08.00 WIB, dalam melakukan kegiatan pengabdian masyarakat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah disusun. Tahap ini melibatkan penyampaian materi mengenai Jaminan Kesehatan Kesehatan Nasional oleh

tenaga kesehatan dengan bantuan visual untuk menarik perhatian masyarakat. Setelah pemaparan materi, tim melakukan diskusi interaktif, di mana pengawas dapat bertanya dan berdiskusi langsung.

4. Tahap Evaluasi

Setelah pelaksanaan kegiatan, tim penyelenggara melakukan evaluasi untuk mengevaluasi kegiatan dilakukan dengan mengukur pemahaman dan respons pengawas lapangan terhadap materi yang disampaikan melalui sesi Tanya jawab. Hasil evaluasi ini kemudian menjadi dasar perbaikan dalam sosialisasi berikutnya serta untuk perencanaan tindak lanjut.

5. Pembahasan

Pembahasan

Pengabdian kepada masyarakat dengan tema “Sosialisasi Jaminan Kesehatan Kepada Pengawas Lapangan di UPTD Pengolahan Sampah dan TPA Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai” terlaksana sesuai jadwal dan secara langsung. Kegiatan ini berlangsung pada 29 Januari 2025 dimulai pukul 08.00 wib sampai dengan selesai. Kegiatan ini bertujuan sebagai wujud memperkenalkan jenis jenis jaminan kesehatan di Indonesia kepada petugas lapangan TPA melalui mandor pegawai lapangan. Sosialisasi menunjukkan pemahaman petugas tentang jenis jaminan kesehatan yang dimilikinya dan apa saja keunggulan yang didapatkan dari jaminan kesehatan tersebut dimana petugas lapangan memiliki dua jenis asuransi kesehatan yaitu BPJS Kesehatan untuk pekerja lapangan yang berstatus PNS dan BPJS Ketenagakerjaan untuk peugas lapangan yang berstatus Non ASN.



Gambar 1 & 2. Sosialisasi Jenis dan Program Jaminan Kesehatan di Indonesia

Kegiatan ini berhasil mencapai target sasaran dimana pengawas lapangan dapat memberikan pemahaman kepada petugas-petugas yang mereka awasi dilapangan. Petugas lapangan seluruhnya sudah memiliki jaminan kesehatan baik itu jaminan kesehatan pemerintah berupa BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

Dari kegiatan ini para pengawas antusias untuk mengetahui perbedaan pelayanan yang diperoleh melalui jaminan kesehatan swasta dan pemerintah serta

mengetahui perbedaan premi, penggunaan dan status pelayanan jaminan kesehatan yang dimilikinya baik itu swasta maupun pemerintah seperti BPJS Kesehatan atau BPJS Ketenagakerjaan.

Kesimpulan

Sistem kesehatan di Indonesia sudah ada sejak zaman Belanda, kemudian dilanjutkan setelah kemerdekaan Indonesia oleh Menteri kesehatan saat itu yaitu Prof. G. A. Siwabessy periode 1966-1978, yang diperuntukkan bagi masyarakat khususnya bagi pegawai negeri sipil dan keluarganya. Saat ini sistem program kesehatan di Indonesia terdiri dari tiga program yaitu asuransi swasta, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Untuk saat ini berdasarkan portal data BPJS Ketenagakerjaan tercatat sebanyak 58,80 juta orang, dan berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2018 dari 261.890.900 orang penduduk Indonesia terdapat 208.054.199 Jiwa yang menggunakan Asuransi Kesehatan Baik Swasta maupun milik Pemerintah. Namun menurut RPJMN 2020-2024 jumlah peserta JKN yang terdaftar sampai 31 Oktober 2024 terdapat 277.538.004 jiwa atau 98,25 persen penduduk Indonesia.

Berdasarkan data yang didapat pada saat melakukan sosialisasi bahwa dari seluruh petugas lapangan di UPTD Pengolahan Sampah & TPA Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai sudah seluruhnya memiliki asuransi kesehatan pemerintah berupa BPJS Ketenagakerjaan yang meng-cover tentang kecelakaan kerja dan kematian karena status petugas lapangan yang masih berstatus NON ASN.

Dari kesimpulan diatas dapat dilihat bahwa penduduk Indonesia sudah sangat memikirkan tentang jaminan kesehatan untuk dirinya dan keluarganya. Kami berharap kedepannya pengawas lapangan dapat memberikan pengetahuan kepada

pekerja di TPA, keluarga maupun orang disekitarnya tentang pentingnya jaminan kesehatan yang harus dimiliki.

DAFTAR PUSTAKA

- Mariyam, S. (2018). Sistem Jaminan Sosial Nasional melalui BPJS Kesehatan (Persektif Hukum Asuransi). *Jurnal Ilmiah UNTAG Semarang*, 7(2), 36–42.
- Ridha Munawarah, V., Ayu Anggraini, W., Azzahra, D., Pramita Gurning, F., Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat, P., Kesehatan Masyarakat, F., Islam Negeri Sumatera Utara, U., & Author, C. (2023). Faktor Yang Mempengaruhi Pemanfaatan Jaminan Kesehatan Nasional Pada Layanan Kesehatan Puskesmas (Literature Review). *Jurnal Kesehatan Tambusai*, 4(3), 4(3), 2229–2237. <https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jkt/article/view/16350>
- Sari, SKM, MSE, K. (2018). Perkembangan Asuransi Kesehatan Swasta di Indonesia 2012 – 2016. *Jurnal Ekonomi Kesehatan Indonesia*, 2(2). <https://doi.org/10.7454/eki.v2i2.2142>
- Yuditia, A., Hidayat, Y., & Achmad, S. (2021). Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional Oleh Bpjs Berdasarkan Undang-Undang No.40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, 6(1), 43. <https://doi.org/10.36722/jmih.v6i1.79>